

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TENAGA KERJA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PDRB DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Cynthia A. Sihombing¹, Vecky A. J. Masinambow², Agnes L.Ch.P. Lopian³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115. Indonesia

E-mail: cynthiasihombing061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kesenjangan kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum maksimalnya peran belanja pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap PDRB baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda menggunakan software EViews 14. Data yang digunakan berupa data time series tahun 2015–2024 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta belanja pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sementara itu, secara simultan ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, Belanja Pemerintah, Serdang Bedagai.

ABSTRACT

Regional economic growth, as measured by GRDP (Gross Domestic Product) in Serdang Bedagai Regency, still faces various challenges, such as disparities in human resource quality, low labor productivity, and the suboptimal role of government spending in supporting economic development. This study aims to determine the effect of the Human Development Index (HDI), labor, and government spending on GRDP, both partially and simultaneously. This study applies a quantitative approach using multiple linear regression using EViews 14 software. The data used are time series data from 2015–2024 obtained from the Statistics Indonesia (BPS) of Serdang Bedagai Regency. The results indicate that partially, the HDI has a positive and significant effect on GRDP, while labor has a negative and insignificant effect, and government spending has a positive but insignificant effect. Meanwhile, simultaneously, all three variables are proven to have a significant effect on GRDP in Serdang Bedagai Regency.

Keywords: Gross Regional Domestic Product, Human Development Index, Labor, Government Spending, Serdang Bedagai.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tingkat keberhasilannya umumnya dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang menggambarkan nilai tambah, struktur perekonomian, dan kapasitas produksi suatu wilayah (Perdana & Rosi, 2023). Dalam konteks tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kemajuan pembangunan karena mencerminkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Meskipun demikian, pembangunan tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan dan output, tetapi juga meliputi perubahan mendasar dalam aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, serta pola nilai dan kehidupan masyarakat secara komprehensif (Suaib, 2023).

Sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2003, Kabupaten Serdang Bedagai hingga kini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya, dengan tanaman pangan dan hortikultura sebagai penopang utama. Ketergantungan pada sektor ini membuat perekonomian daerah rawan terguncang oleh perubahan iklim maupun gejolak harga komoditas. Oleh sebab itu, upaya diversifikasi ke sektor jasa, perdagangan, dan industri menjadi langkah krusial agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata dan tidak bergantung pada satu sektor saja.

Tabel 1. Tabel Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (Miliar)	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru, Satuan Persen)	Tenaga Kerja (Orang)	Belanja Pemerintah (Rupiah)
2015	Rp. 15.841.950.000.000	68.01	9.364	Rp.1.166.459.388.000
2016	Rp. 16.656.170.000.000	68.77	9.993	Rp.1.439.262.749.000
2017	Rp. 17.516.430.000.000	69.16	9.194	Rp.1.386.104.800.000
2018	Rp. 18.421.380.000.000	69.69	7.650	Rp.1.545.996.806.000
2019	Rp. 19.393.390.000.000	70.21	6.509	Rp.1.570.582.943.000
2020	Rp. 19.308.460.000.000	70.24	7.255	Rp.1.665.849.841.000
2021	Rp. 19.863.240.000.000	70.56	7.779	Rp.1.487.563.904.000
2022	Rp. 20.749.070.000.000	71.21	19.643	Rp.1.679.403.077.000
2023	Rp. 21.792.070.000.000	73,40	19.657	Rp.1.626.031.411.000
2024	Rp. 22.883.580.000.000	74,15	19. 671	Rp.1.773.612.138.000

Sumber : Data BPS Serdang bedagai

Berdasarkan data dalam Tabel 1, Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat dan relatif stabil. Nilai PDRB tercatat sebesar Rp15,84 triliun pada tahun 2015 dan meningkat menjadi Rp22,88 triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi kontraksi hingga Rp19,30 triliun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian daerah memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik, namun tetap rentan terhadap guncangan eksternal.

Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan output dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kualitas sumber daya manusia. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, yang salah satunya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari 68,01 pada tahun 2015 menjadi 74,15 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam proses produksi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, struktur tenaga kerja di Kabupaten Serdang Bedagai masih didominasi oleh sektor primer dan informal yang cenderung memiliki tingkat produktivitas lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Perkembangan jumlah tenaga kerja selama periode 2015–2024 juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dari 9.364 orang pada tahun 2015 menjadi 19.671 orang pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu berjalan seiring dengan peningkatan PDRB.

Di sisi lain, belanja pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor-sektor produktif seperti infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan. Selama periode penelitian, belanja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meningkat dari Rp1,16 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1,77 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015–2024, baik secara parsial maupun simultan, sebagai dasar empiris dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serdang Bedagai, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis sebagai referensi bagi pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi PDRB di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, memperkaya literatur akademik di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, serta menambah wawasan penulis dan mahasiswa dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan per kapita dalam jangka panjang (Fatimatuzzahro, 2022). Menurut Todaro, pembangunan ekonomi bersifat multidimensional karena mencakup peningkatan output, perubahan struktur sosial, pola pikir, serta kelembagaan untuk mengurangi kemiskinan (Sukwiaty et al., 2009).

2.2 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB menggambarkan akumulasi nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah, sekaligus merepresentasikan nilai moneter dari keseluruhan produk dan jasa akhir yang dihasilkan pelaku ekonomi dalam kurun waktu tertentu (Romadhon, 2024). Dalam kajian ekonomi regional, PDRB berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk melihat dinamika pertumbuhan ekonomi sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Menurut (Romadhon, 2024) Jenis- jenis Produk Domestik Regional Bruto dibagi 2, yaitu:

- 1) PDRB Harga Berlaku, yaitu mengukur nilai tambah produk dan jasa pada tahun berjalan menggunakan harga yang berlaku saat itu, sehingga lazim dipakai untuk mengamati perubahan struktur ekonomi antarwaktu.
- 2) PDRB Harga Konstan, yaitu mengukur nilai tambah dengan mengacu pada harga tahun dasar tertentu sehingga bebas dari efek inflasi/deflasi. Karena itu, indikator ini menjadi acuan utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi riil, baik tahunan maupun kuartalan.

Terdapat tiga pendekatan penghitungan PDRB, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022).

1) Pendekatan Produksi

Diperoleh dari total produksi bruto tiap sektor/subsektor (terklasifikasi dalam 17 lapangan usaha) dikurangi biaya input antara.

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional;

Q = kuantitas;

P = harga barang/jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

PDRB pendekatan pendapatan menghitung total pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah selama satu periode (biasanya satu tahun), sebelum dikurangi pajak langsung. Komponennya meliputi upah/gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba usaha, sehingga mencerminkan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi.

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional,
 r (*Rent*) = Sewa tanah/bangunan,
 w (*Wages*) = Upah/gaji tenaga kerja,
 i (*Interest*) = Bunga modal dan
 p (*Profit*) = Keuntungan pengusaha.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB sebagai jumlah seluruh komponen permintaan akhir dalam satu periode, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan persediaan, dan ekspor bersih.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional,
 C = Konsumsi rumah tangga,
 I = Investasi,
 G = Konsumsi pemerintah,
 X = Ekspor
 M = Impor.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia memandang manusia sebagai tujuan utama pembangunan, bukan hanya alat pencapaian pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pilihan hidup yang tersedia bagi masyarakat, semakin baik pula kualitas hidup mereka. IPM berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia dari sisi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Statistics, 2015a). UNDP dalam *Human Development Report* pertamanya (1990) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai upaya memperluas pilihan hidup masyarakat, khususnya untuk mencapai usia panjang yang sehat, pendidikan yang layak, dan standar hidup yang memadai (Statistik, 2015b).

Menurut UNDP, IPM dibangun dari tiga dimensi pokok, yaitu kesehatan yang diukur melalui usia harapan hidup, pendidikan yang semula diukur dari tingkat melek huruf, dan ekonomi yang semula diwakili oleh PDB per kapita (Statistics, 2015b). Seiring tingginya capaian pembangunan di berbagai negara, UNDP memperbarui indikator ekonomi menjadi PNB per kapita dan mengubah metode penghitungan menjadi rata-rata geometrik agar lebih peka terhadap kesenjangan antardimensi.

Schultz dan Becker berpendapat bahwa investasi di bidang pendidikan dan pelatihan mampu mendorong produktivitas sekaligus pertumbuhan ekonomi. Becker (1964) menyebut modal manusia sebagai faktor kunci penggerak ekonomi. Takwa et al. (2025) merangkum lima gagasan pokok Human Capital:

1. SDM dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar pos biaya.
2. Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan karyawan.
3. Kualitas SDM berbanding lurus dengan produktivitas dan kinerja perusahaan.
4. Kreativitas SDM menjadi sumber inovasi yang memperkuat daya saing.
5. Di era digital, pengelolaan SDM ditopang oleh *people analytics*, otomatisasi berbasis AI, dan pembelajaran digital berkelanjutan.

IPM dan pertumbuhan ekonomi saling memengaruhi secara timbal balik: pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya bagi pembangunan manusia, sedangkan kualitas manusia yang baik turut mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sesuai Hukum Okun, produktivitas yang meningkat salah satunya didorong oleh IPM dapat menurunkan tingkat pengangguran (Palindangan & Bakar, 2021). Selain itu, IPM yang tinggi memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyerap teknologi dan memanfaatkan kelembagaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ramadhon, 2021).

2.4 Tenaga Kerja

Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003, angkatan kerja didefinisikan sebagai seluruh individu yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Simanjuntak memperluas pengertian ini dengan memasukkan siapa saja yang pernah bekerja, sedang bekerja, maupun berpotensi bekerja termasuk pelajar dan pengurus rumah tangga dengan menjadikan usia sebagai acuan utama dalam menentukan kelompok

usia produktif (Agusmidah, 2010). Sementara itu, Suparmoko & Bawana (2023) memisahkan angkatan kerja (mencakup mereka yang bekerja, mencari pekerjaan, atau berstatus siap kerja) dari kelompok non-angkatan kerja, yaitu pelajar dan ibu rumah tangga yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Hubungan ini tergambar dalam persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\text{Penduduk} &= \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja} \\ \text{Angkatan Kerja} &= \text{Orang Bekerja} + \text{Pengangguran}\end{aligned}$$

Kualitas dan jumlah tenaga kerja turut menentukan besarnya kapasitas produksi serta laju pertumbuhan PDRB, sehingga pengelolaannya melalui jalur pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting bagi kinerja ekonomi suatu daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Kesumawati & Fisabilillah (2024) di Jawa Timur, yang mengungkap adanya hubungan positif dan signifikan antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja sekaligus menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mendorong investasi industri dan pembangunan infrastruktur guna memperluas kesempatan kerja.

2.5 Belanja Pemerintah

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disahkan DPR sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Presiden RI, 2003). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yang bertujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan output dan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Faradilla et al., 2021).

Belanja Pemerintah Pusat adalah alokasi pengeluaran untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta memenuhi kewajiban negara di tingkat domestik maupun internasional, guna menjaga kredibilitas dan citra Indonesia (Sadat, 2022). Guritno 1999 dalam (Faradilla et al., 2021) menyatakan bahwa pengeluaran publik mencerminkan kebijakan resmi, yaitu jumlah dana yang disediakan untuk merealisasikan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Terdapat dua jenis utama pengeluaran pemerintah:

- 1) Pengeluaran Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk mendukung tugas pemerintahan pusat dan daerah, diklasifikasikan berdasarkan: (a) organisasi/bagian anggaran, (b) fungsi (pelayanan umum, pertahanan, keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dll.), dan (c) jenis belanja (pegawai, barang, modal, subsidi, dll.).
- 2) Pengeluaran Pemerintah Daerah, terbagi menjadi belanja rutin (pengeluaran berkala untuk operasional), belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Menurut Keynes (dalam Sukirno, 2000), intervensi pemerintah tetap diperlukan karena perekonomian sulit mencapai kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan stabil tanpa campur tangan negara. Pasar bebas cenderung tidak seimbang dan rentan berfluktuasi tajam, yang berdampak pada kesempatan kerja, pengangguran, dan stabilitas harga. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter perlu dioptimalkan untuk mengendalikan siklus ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang merata. Dasar teori pengeluaran pemerintah tercermin dalam identitas keseimbangan pendapatan nasional:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Berdasarkan persamaan ini, peningkatan pengeluaran pemerintah (G) akan meningkatkan pendapatan nasional, dan sebaliknya. Kebijakan fiskal berfokus pada pengendalian pendapatan dan pengeluaran pemerintah melalui APBN sebagai instrumen utama, dengan komponen yang dapat dikendalikan berupa pengeluaran negara dan penerimaan pajak (Sholikhah et al., 2020). Sejalan dengan pandangan Keynes (dalam Sukirno, 2000), keterlibatan pemerintah tetap penting karena mekanisme pasar bebas semata tidak menjamin tercapainya kesempatan kerja penuh maupun stabilitas ekonomi, dan berpotensi memicu gejolak yang berdampak pada kesempatan kerja, pengangguran, serta pergerakan harga.

2.6 Peneliti Terdahulu

Andini Mulyasari (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto” dengan menggunakan analisis regresi data panel melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang diestimasi menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angkatan kerja, baik secara simultan maupun parsial, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Patanduk et al. (2019) meneliti “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan data sekunder

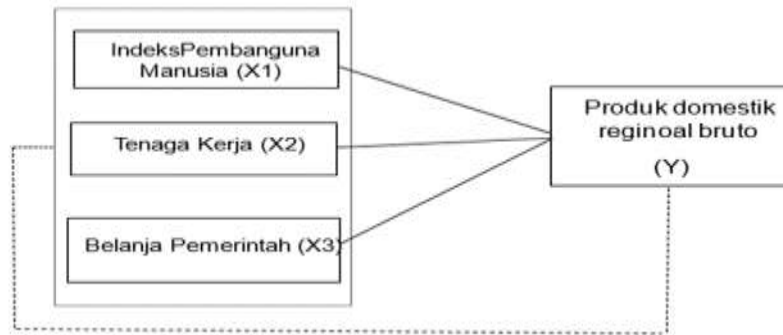
periode 2006–2017”. Penelitian tersebut menerapkan metode path analysis yang dipadukan dengan regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB, tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Humiang et al. (2013) dalam penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2003–2012” menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa investasi swasta dan belanja modal berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel tenaga kerja terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur pemikiran ilmiah berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut:

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Penulis

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menjelaskan keterkaitan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah sebagai variabel independen. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan periode pengamatan tahun 2015–2024. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series tahun 2015–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi data PDRB, IPM, tenaga kerja, dan belanja pemerintah daerah.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan dan diukur sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (X1): ukuran capaian pembangunan manusia dari dimensi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup, dinyatakan dalam persentase per tahun.
2. Tenaga Kerja (X2): jumlah penduduk usia produktif yang bekerja atau terserap dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai, dinyatakan dalam satuan orang.
3. Belanja Pemerintah (X3): seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam APBD per tahun anggaran, meliputi belanja operasional dan belanja modal, dinyatakan dalam rupiah.
4. Produk Domestik Regional Bruto (Y): nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan unit usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan miliar rupiah.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda berbantuan perangkat lunak EViews 14 SV, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- Y = PDRB;
 a = konstanta;
 X1 = IPM;
 X2 = tenaga kerja;
 X3 = belanja pemerintah;
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi;
 e = error term.

Pengujian statistik yang digunakan meliputi uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, uji korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) untuk memastikan model regresi memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi EViews 14 SV untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: PDRB					
Method: Least Squares					
Date: 04/15/26 Time: 03:25					
Sample: 2015 2024					
Included observations: 10					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	8.383237	1.452001	5.773577	0.0012	
IPM	0.020562	0.005139	4.000799	0.0071	
TK	-7.91E-07	1.25E-06	-0.630577	0.5516	
BP	0.283769	0.139406	2.035567	0.0880	
R-squared	0.957271	Mean dependent var		13.28164	
Adjusted R-squared	0.935906	S.D. dependent var		0.050418	
S.E. of regression	0.012764	Akaike info criterion		-5.595165	
Sum squared resid	0.000978	Schwarz criterion		-5.474131	
Log likelihood	31.97583	Hannan-Quinn criter.		-5.727940	
F-statistic	44.80644	Durbin-Watson stat		1.721080	
Prob(F-statistic)	0.000168				

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 14

Hasil estimasi menghasilkan persamaan $Y = 8.383237 + 0.020567 \text{ IPM} - 0.000000791 \text{ TK} + 0.283769 \text{ BP} + e$. Secara parsial, variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan koefisien 0.020567, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel tenaga kerja memiliki koefisien negatif sebesar -0.000000791 dan tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum mampu meningkatkan output ekonomi secara optimal. Sementara itu, belanja pemerintah menunjukkan pengaruh positif dengan koefisien 0.283769, namun belum signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga peningkatan belanja pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan PDRB.

4.1.2 Uji Statistik

4.1.2.1 Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan uji-t melalui tabel *coefficients*. Suatu variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sedangkan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam model regresi.

Berikut ialah penjelasan berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel tersebut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 4,000799, lebih besar dari t-tabel 2,447 pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Tenaga Kerja

Variabel tenaga kerja memiliki nilai t-hitung sebesar -0,630577, lebih kecil dari t-tabel 2,447. Hasil ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum diikuti dengan peningkatan produktivitas ekonomi secara optimal.

3) Belanja Pemerintah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah memiliki nilai t-hitung sebesar 2,035567, lebih kecil dari t-tabel 2,447. Artinya, belanja pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.2.2 Uji f (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai f-statistic sebesar 44,80644, lebih besar dari f-tabel 4,757, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.2.3 Uji Kolerasi (R) dan Uji Determinasi (R²)

Nilai R-Square sebesar 0,957271 menghasilkan koefisien korelasi (R) 0,9784 yang menunjukkan hubungan sangat kuat antara IPM, tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap PDRB karena berada di atas 0,50. Ukuran seberapa besar faktor-faktor independen menjelaskan variabel dependen adalah koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,957271 menunjukkan bahwa IPM, tenaga kerja, dan belanja pemerintah menjelaskan 96% variasi PDRB, sedangkan 4% sisanya dipengaruhi faktor lain.

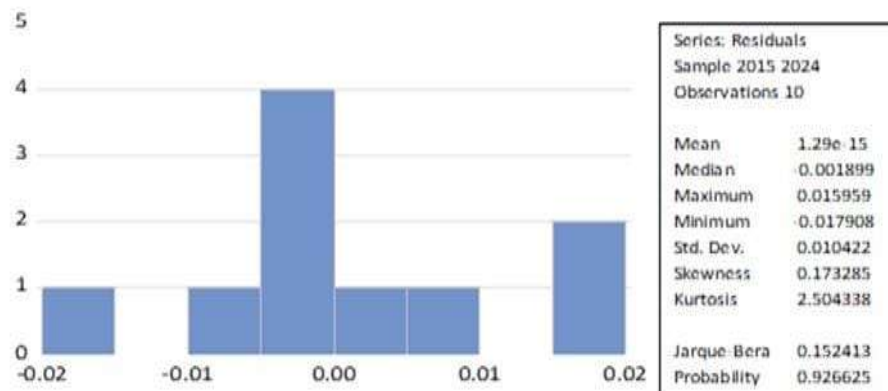
4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat penggunaan OLS pada regresi linear berganda untuk memastikan data memenuhi normalitas, linearitas, serta bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Duli, 2019). Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik menggunakan E-Views 14 pada model regresi yang telah diolah.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Data yang berdistribusi normal ditentukan melalui uji Jarque-Bera, yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka data normal, sedangkan jika < 0,05 maka data tidak normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olah Data Eviews 14

Berdasarkan hasil output uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai probability Jarquare Bera (JB) sebesar $0.926625 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga model regresi dapat digunakan untuk mengujian hipotesis.

4.1.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat hubungan antar residual dalam model regresi. Pada penelitian ini digunakan Breusch-Godfrey LM Test di EViews, dengan kriteria jika p-value $\text{Obs} \cdot R\text{-squared} < 0,05$ terdapat autokorelasi, sedangkan jika $> 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.110436	Prob. F(2,4)	0.8981
Obs*R-squared	0.523287	Prob. Chi-Square(2)	0.7698

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 14

Berdasarkan Uji Breusch-Godfrey serial correlation LM-Test diperoleh nilai dari prob.Chis Square lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.7698 > 0.05$) artinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi, sehingga model ini layak untuk di gunakan.

4.1.3.3 Uji Multikolerasi

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan Variance Inflation Factor (VIF), dimana $VIF > 10$ menunjukkan multikolinearitas, sedangkan $VIF < 10$ menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Variance Inflation Factors Date: 04/15/26 Time: 22:28 Sample: 2015 2024 Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.108306	129403.0	NA
IPM	2.64E-05	8072.551	5.515501
TK	1.57E-12	15.88441	2.732827
BP	0.019434	177050.0	2.924783

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 14

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF IPM 5,515501, tenaga kerja 2,732827, dan belanja pemerintah 2,924783 yang semuanya < 10 , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pada penelitian ini digunakan uji White, di mana jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.991067	Prob. F(7,2)	0.5879
Obs*R-squared	7.762229	Prob. Chi-Square(7)	0.3540
Scaled explained SS	2.101863	Prob. Chi-Square(7)	0.9540

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 14

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji White Dimana nilai p-value yang ditunjukkan dengan nilai prob.Chis Square pada $\text{obs} \cdot R\text{-square}$ yaitu sebesar 0.3540, oleh karena

itu Prob.Chi Square lebih besar dari $\alpha = 5\%$ ($0.3540 > 0.05$) maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2 Pembahasan

Pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai (Positif dan Signifikan)
Hasil regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai. Artinya, semakin tinggi IPM maka PDRB juga meningkat karena kualitas SDM yang lebih baik meningkatkan produktivitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andini Mulyasari (2016) yang menemukan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
2. Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai (Negatif dan tidak Signifikan)
Hasil regresi menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum diikuti peningkatan produktivitas, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini selaras dengan teori Solow yang menekankan pentingnya kualitas SDM dan teknologi dalam meningkatkan output. Hasil ini juga sejalan dengan Patanduk et al. (2019) yang menemukan pengaruh negatif dan tidak signifikan tenaga kerja terhadap PDRB.
3. Belanja Pemerintah terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai (Positif tetapi tidak signifikan)
Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara teoritis, menurut Keynes, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, namun dalam penelitian ini pengaruhnya belum signifikan. Hal ini diduga karena kurang optimalnya alokasi anggaran, dominasi belanja operasional, serta dampak yang bersifat tidak langsung. Hasil ini sejalan dengan Humiang et al. (2013) yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan.
4. Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai (Signifikan)
Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa IPM, tenaga kerja, dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai, serta model regresi mampu menjelaskan variasi PDRB dengan baik. Secara teoritis, ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kualitas SDM, faktor produksi, dan kebijakan fiskal. Signifikansi uji F juga menunjukkan bahwa meskipun secara parsial ada variabel yang tidak signifikan, secara simultan seluruh variabel tetap memberikan kontribusi terhadap PDRB, sehingga pendekatan multivariat lebih tepat digunakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai” sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Tenaga kerja memiliki hubungan negatif dan pengaruh yang tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Belanja pemerintah memiliki hubungan positif dan pengaruh yang tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Belanja Pemerintah secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR PUSTAKA

- Perdana, A. C., & Rosi, A. I. (2023). Ekonomi Pembangunan Daerah. In Efitra (Ed.), *STKIP PGRI Sumbar Press* (1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suaib, S. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (S. S. M. S. Dr. Umar Nain (ed.); Vol. 32, Issue 3). CV. Adanu Abimata.
- Statistik B. P. (2010-2024). *Data Produk Domestik Bruto*, Serdang Bedagai.
- Statistik B. P. (2010-2024). *Data Indeks Pembangunan Manusia*, Serdang Bedagai.
- Statistik B. P. (2010-2024). *Data Tenaga Kerja*, Serdang Bedagai.
- Statistik B. P. (2010-2024). *Data Belanja Pemerintah*, Serdang Bedagai.
- Staatistik B. P. (2015). *Dalam Angka*, Serdang Bedagai.
- Fatimatuzzahro, F. (2022). Modul Perkuliahan Ekonomi Pembangunan. In *Digilib.Uinkhas.Ac.Id* (Vol. 13, Issue 1).
- Sukwiaty, S., Jamal, S., & Sukamto, S. (2009). *Ekonomi* (E. Gafar (ed.); 1st ed.). Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Romadhon, D. R. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Pengeluaran 2019-2023. In *Produk Domestik Regional Bruto*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dinas Komunikasi dan Informatika. (2022). Analisis Ekonomi Dan Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap Tahun 2022. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap*.
- Statistik, B. P. (2015a). Indeks Pembangunan manusia (Metode Baru). In *Badan Pusat Statistik Indonesia* (Vol. 2015, Issue September).
- Statistik, B. P. (2015b). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Badan Pusat Statistik.
- Takwa, M., Putri, M. T., & Nurtiono, H. (2025). *Human Capital Excellence : Strategi Pengembangan SDM Berkelanjutan* (M. M. Mutoffa (ed.); 1st ed.). Alungcipta.
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1), 65–80. https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal_kritis/article/view/149
- Agusmidah, A. (2010). *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. USU Press.
- Suparmoko, S., & Bawana, I. R. (2023). *Ekonomi* (E. Gafar (ed.); 1st ed.). Yudisthira.
- Kesumawati, F. O., & Fisabilillah, L. W. (2024). Analisis Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 44–51. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.62970>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Kuangan Negara*.
- Faradilla, H., Ratih, R., & Hasan, B. (2021). *Kuangan Daerah* (M. Suardi (ed.);
- Cynthia A. Sihombing

1st ed.). CV. AzkA Pustaka.
https://www.google.co.id/books/edition/keuangan_daerah/jglzeaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+apbd&printsec=frontcover

Sadat, A. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan* (1st ed.). Deepublish.

Andini Mulyasari. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 1–14. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/22174-Article Text-45601-1-10-20180314.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/22174-Article%20Text-45601-1-10-20180314.pdf)

Patanduk, C. Y., Rumat, V. A., & Naukoko, A. T. (2019). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3988–3997.
<file:///C:/Users/ACER/Downloads/iogi2018,+7.3.+Christine+Yona+Patanduk.OK.pdf>

Humiang, M., Rumat, V., & Steeva, T. (2013). *Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2003-2012*. 1–15. [file:///C:/Users/acer/downloads/Jurnal Efisiensi patrick+Maikel+Humiang.pdf](file:///C:/Users/acer/downloads/Jurnal%20Efisiensi%20patrick+Maikel+Humiang.pdf)